

Jum'at, 4 Maret 2011

# Laporan Keuangan Harus Transparan



*Drs. Cornelis, MH*

**PONTIANAK (MED)** - Merujuk pada pengelolaan APBD, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH menegaskan agar dilakukan secara transparan, apalagi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, sehingga tidak ada lagi terjadi kesalahan atau

kekurangan.

"Jangan ditutup-tutupi, semua harus terbuka dan jangan juga kita menunda pekerjaan, apalagi yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Jika terjadi kesalahan harus secepatnya diperbaiki jangan lalaikan," kata Cornelis, pada sejumlah wartawan, belum lama ini.

BPK memiliki wewenang untuk menilai laporan yang masuk, lanjut Cornelis mengatakan, BPK juga menentukan benar atau tidaknya laporan keuangan yang masuk. Untuk itu buatlah laporan yang sesuai dengan peraturan maupun penggunaan.

Cornelis mengatakan, dengan telah diterbitkannya Peraturan BPK RI Nomor 2 tahun 2010, tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. "Untuk itu jika BPK menyatakan terdapat kesalahan

**KE HAL. 10**

## Laporan Keuangan Harus Transparan

Dari Hal. 1

pada laporan yang dilakukan oleh salah satu SKPD yang ada di Kalbar maka saya harapkan secepat mungkin SKPD yang bersangkutan dapat menyelesaikan laporan tersebut. Dimana semua itu guna memperlancar pelaksanaan kerja BPK," ucapnya.

Dijelaskannya, dari peraturan yang dikeluarkan oleh BPK RI, harus menjadi perhatian kepada seluruh bupati/walikota, dimana telah ditetapkan batas ketentuan terhadap hasil laporan yaitu selama 60 hari. "Untuk itu diharapkan, jangan sampai melakukan kesalahan apalagi masalah keuangan, karena segala kesalahan ditanggung bersama, jangan sampai nanti kalau sudah ditangkap oleh Jaksa atau Polisi baru kita mulai kocarkacir," katanya.

Lebih jauh dikatakannya, seluruh SKPD harus transparan dalam men-

yampaikan laporan keuangan, karena penyampaian informasi terhadap pemerintah pusat, saat ini sudah tidak dapat dibatasi lagi. Untuk itu apapun kesalahan yang dilakukan oleh daerah, maka akan diketahui oleh pemerintah pusat.

"Jadi dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPK, diharapkan kepada seluruh SKPD terkait dalam melakukan laporan keuangan harus mengacu para peraturan yang berlaku, karena BPK dilindungi oleh UU dan merupakan pengawas jalannya pemerintahan di daerah terhadap keuangan. Kedepan saya berharap tidak ada lagi disclaimer, karena akan memakan waktu dan tenaga untuk memperbaikinya," tukas Cornelis mengakhiri. **(DEV)**